

## **ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAMBI**

Oleh:

Budi Saputra<sup>1)</sup>, Yohanes Vyn Amzar<sup>2)</sup>, Purwaka H.P.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Prodi IE FEB Universitas Jambi, <sup>2)</sup> Staf Pengajar Prodi IE FEB Universitas Jambi

### **ABSTRACT**

*The main objectives of this research are to analyze self-reliance of local financial independence and its impact on economic growth on municipalities and cities in the Province of Jambi. The research object is composed of 10 districts and cities in the Province of Jambi. The data of PAD, GDP, TPD, Balance Funds, and Economic Growth are analysed by using two approaches. Firstly, data are used to analyse of financial independence ratio (to calculate the ratio of local financial independence) and secondly, utilised simple linear regression analysis with panel data (to analyze the influence of local financial independence to economic growth municipalities and cities in the Province of Jambi). Based on data analysis, this study was obtained two conclusions. First, the financial independence of city and district in Jambi Province during the period of research is still in the very low category with an average percentage below the 10% figure. Second, the results from simple linear regression analysis with panel data approach using fixed effect method found that financial independence has positive effect on the economic growth of regions and statistically significant (with  $\alpha: 10\%$ ). This empirical finding shows that the higher the ratio of local financial independence, the higher the increasing of economic growth on municipalities and cities in the Province of Jambi. These also explain that economic growth must be supported by an increase in the area of financial independence. Initiative and the willingness and hard work of the local government should be there to increase revenue. In addition, it is also necessary to evaluate the use of matching funds to increase self-reliance.*

**Keywords:** Independence, Local Finance, Economic Growth, Linear Regression Panel Data

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut Rochjadi (2006), desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah setara dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi fiskal adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan aspek penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar daerah dapat menggali sumber-

sumber keuangannya sendiri untuk membiayai kebutuhan daerah, tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat karena sebagai sumber pendapatan yang murni berasal dari daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah dapat diketahui dari penerimaan PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD), jika jumlah PAD suatu daerah meningkat maka kemandirianya juga meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sidik (2002), bahwa pada era otonomi PAD harus menjadi sumber penerimaan utama. Hal ini karena sumber pendapatan lain terlalu berfluktuatif diluar kewenangan pemerintah. Keadaan tersebut terlihat dari jumlah penerimaan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selalu meningkat seperti dalam Tabel 1. Dari data tersebut diketahui bahwa rata-rata angka PAD kabupaten dan kota mengalami kenaikan mulai dari tahun 2009-2013.

Kondisi ini juga terjadi pada angka pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota, kecuali pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan. Seperti terlihat dalam Tabel 2. Berdasarkan data-data pada tabel di atas, kemudian timbul pertanyaan bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi serta bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kemandirian keuangan daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari kemandirian. Kemandirian keuangan daerah

merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah harus membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Untuk itu diperlukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Dari analisa tersebut dapat diketahui permasalahan dan solusi yang tepat untuk mengurangi ketidakmandirian keuangan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan dan pengelolaannya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin membaik.

**Tabel 1. PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 (Juta rupiah)**

No.	Nama Kabupaten	Jumlah PAD					Rata-rata
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Kerinci	20.856	20.056	18.234	32.017	36.444	25.521
2.	Merangin	27.822	25.316	35.395	36.514	44.396	33.888
3.	Sarolangun	37.977	20.745	26.896	14.212	41.168	28.200
4.	Tebo	18.266	15.956	22.332	30.692	25.842	25.842
5.	Bungo	41.978	46.664	64.232	64.281	80.201	59.471
6.	Batanghari	18.328	22.251	35.729	37.229	50.623	32.832
7.	Kota Jambi	55.671	70.842	98.999	113.090	109.338	89.588
8.	Muaro Jambi	14.804	17.156	28.413	36.510	35.853	26.547
9.	Tanjab Barat	23.778	23.536	44.011	52.776	43.683	37.557
10.	Tanjab Timur	19.236	19.772	24.372	29.435	27.485	24.060
	Rata-rata	27.871	28.229	39.861	44.675	49.503	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, beberapa tahun

**Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**

No.	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)					Rata-Rata
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Kerinci	5,88	5,89	5,72	6,55	6,44	6,10
2.	Merangin	8,42	7,85	7,02	6,47	6,45	7,24
3.	Sarolangun	7,99	8,35	8,80	7,98	7,77	8,18
4.	Batang Hari	5,14	6,05	7,90	7,13	6,84	6,61
5.	Muaro Jambi	5,52	5,29	5,32	7,25	7,69	6,21
6.	Tanjab Timur	5,00	5,56	6,83	7,44	4,09	5,78
7.	Tanjab Barat	6,39	6,88	7,85	7,68	7,55	7,27
8.	Tebo	5,01	6,43	6,78	6,73	6,51	6,29
9.	Bungo	6,39	6,73	7,68	7,51	7,48	7,16
10.	Kota Jambi	6,47	6,66	6,97	7,05	7,76	6,98
	Rata-rata	6,22	6,57	7,09	7,18	6,86	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, beberapa tahun (data diolah)

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disingkat dengan KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai balas jasa bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim dan Damayanti, 2007).

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat apakah kenaikan PDRB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan Boediono (1999), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari Produk Domestik Bruto potensial atau output dari suatu negara.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi. Dari beberapa faktor tersebut, modal merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik. Menurut pandangan ekonom Neo-Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Demikian pula yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh alokasi belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin besar dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah seharusnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan model analisis regresi sederhana data panel. Analisis deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data kuantitatif perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2009-2013, sedangkan analisis regresi linier data panel dilakukan dengan menggunakan bantuan program software EViews 7.0.

Data yang digunakan dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data panel. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2013.
2. Data Total Pendapatan Daerah (TPD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2013.
3. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku tahun 2000 untuk periode 2009-2013

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data keuangan dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku tahun 2000 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
2. Profil mengenai pertumbuhan ekonomi dan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.
3. Data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah (TPD) dari kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi.

Analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2009-2013. Sedangkan alat analisis regresi linier sederhana data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 1. Menghitung Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Untuk menganalisis permasalahan pertama diadopsi model yang dikemukakan Halim (2002) dengan menghitung perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pengeluaran Daerah (TPD). Formulasi perhitungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

$$KKD = \frac{P}{T} \times 100 \% \quad (1)$$

dimana :

KKD = Kemandirian Keuangan Daerah

PAD= Pendapatan Asli Daerah

TPD= Total Pengeluaran Daerah

Semakin besar nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) maka semakin besar pula kemandirian fiskal suatu Kabupaten atau Kota di Provinsi Jambi. Pengukuran kriteria DDF tersebut dapat dilihat melalui tabel derajat kemandirian keuangan daerah.

**Tabel 3. Interval Kemandirian Keuangan Daerah (dalam %)**

Interval Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50, 00	Sangat tinggi

## 2. Menghitung Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Alat analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua adalah model analisis regresi linier sederhana data panel dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis dengan bantuan program software EViews. Alat analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga jenis cara untuk mengestimasi parameter model dengan data panel yaitu metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect*. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect* dengan asumsi untuk menghindari perubahan intersep pada data silang tempat dan runtut waktu seperti yang terjadi pada metode *Pooled Least Square*.

Adapun model estimasi yang diajukan untuk melihat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 KKD_{it} + \mu_{it} \quad (2)$$

di mana:

PE	: Pertumbuhan Ekonomi (%)
KKD	: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1$	: Koefisien regresi
$\mu$	: gangguan / standar error
i	: Kabupaten/ Kota ke-i
t	: Periode waktu (2009,...,2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu faktor

penting dalam mendukung kinerja pemerintah daerah. Baik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah semakin rendah. Tidak ada ukuran yang pasti dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, karena hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing. Dalam penelitian ini untuk menghitung tinggi atau rendahnya angka kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2013 digunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) dengan membandingkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan angka Total Pengeluaran Daerah (TPD), karena pendekatan ini yang umumnya digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah (Halim, 2002).

Dari hasil perhitungan diperoleh angka-angka kemandirian keuangan daerah setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Data ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria pada Tabel 1 sebelumnya. Jika angka kemandirian keuangan berada dibawah 0,10% termasuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan jika angka kemandirian berada diatas angka 50% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Semakin besar nilai KKD, artinya semakin kecil pula tingkat ketergantungan suatu kabupaten atau kota di Provinsi Jambi terhadap dana dari pemerintah pusat. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah nilai KKD maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pemerintah pusat. Dari hasil perhitungan dan klasifikasi tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2013 maka diperoleh data seperti dalam Tabel 4.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2013 mengalami keadaan yang berfluktuatif. Meskipun angka kenaikan dan penurunannya masih relatif kecil. Secara keseluruhan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi masih sangat rendah. Rata-rata angka kemandirian keuangan daerah dari seluruh kabupaten dan kota masih di bawah angka 5%, kecuali Kota Jambi dengan rata-rata sebesar 10,13%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bungo sebesar 7,65%. Sementara itu, daerah dengan rata-rata angka kemandirian keuangan terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan angka hanya 2,79%, diikuti oleh Kabupaten Tebo di urutan kedua terendah yakni hanya 3.90%.

**Tabel 4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 (dalam Persen)**

	Kabupaten dan Kota	Tahun					Rata-rata	Keterangan
		2009	2010	2011	2012	2013		
1.	Kerinci	3,83	3,70	4,83	4,12	4,99	4,29	Sangat rendah
2.	Merangin	4,46	5,45	5,32	3,64	4,31	4,64	Sangat rendah
3.	Sarolangun	3,66	4,85	4,49	3,42	4,98	4,28	Sangat rendah
4.	Tebo	3,32	5,69	3,30	3,74	3,44	3,90	Sangat rendah
5.	Bungo	6,80	6,74	8,16	7,47	9,06	7,65	Sangat rendah
6.	Batanghari	3,38	5,37	5,05	4,51	4,63	4,59	Sangat rendah
7.	Kota Jambi	10,78	10,52	10,18	9,49	9,70	10,13	Rendah
8.	Muaro Jambi	2,74	3,16	3,78	3,94	3,75	3,47	Sangat rendah
9.	Tanjung Jabung Barat	2,97	3,69	3,69	3,30	3,36	3,40	Sangat rendah
10.	Tanjung Jabung Timur	2,56	2,51	2,92	3,10	2,86	2,79	Sangat rendah
	Rata-rata	4,45	5,17	5,17	4,67	5,11	4,91	

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (data diolah)

Dari uraian dan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama lima tahun masih berada dalam skala interval yang sangat rendah. Karena masih berada dalam skala interval 0,00-10,00% yakni dengan rata-rata per kabupaten hanya sebesar 4,95%. Keadaan ini menjelaskan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerah masih sangat rendah. Kondisi ini disebabkan karena PAD kabupaten dan kota di Provinsi Jambi relatif kecil dibandingkan dengan total pengeluaran daerahnya masing-masing, sehingga dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung pada pemberian/bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

## 2. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi

### a. Analisis regresi linier sederhana

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan alat analisis regresi linier sederhana menggunakan data panel. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program EViews 7.0, maka diperoleh model estimasi persamaan regresi linier sederhananya sebagai berikut:

$$PE_{it} = 4,924422 + 0,377742 DDF_{it}$$

$$t\ stat \quad \quad \quad 5,0760 \quad \quad \quad 1,9266$$

$$F\text{-statistic} \quad = 4,095053$$

$$R\text{-squared} \quad = 0,620928$$

$$DW\ stat \quad = 1,515975$$

Persamaan tersebut merupakan persamaan hasil regresi sederhana yang menunjukkan hubungan antara variabel kemandirian keuangan daerah sebagai variabel independen dan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013. Jika selama periode penelitian tersebut derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan, demikian pula sebaliknya.

Dari hasil regresi tersebut juga dapat diketahui rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama periode 2009-2013 yaitu sebesar 4,92%, dengan asumsi bahwa persentase derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 tidak mengalami perubahan atau tetap. Berdasarkan hasil persamaan regresi, terlihat koefisien regresi sebesar 0,377742 menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Artinya jika derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 0,39% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Berdasarkan analisis di atas dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara persentase derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut dikarenakan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dan membutuhkan proses serta waktu yang cukup lama. Khususnya dari derajat desentralisasi fiskal sisi pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi seperti investasi yang secara tidak langsung dapat mendorong kegiatan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berdampak pada peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, namun pengaruhnya tersebut tidak dapat langsung dirasakan.

Kondisi ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 1.926624 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,0622 yang lebih besar dari  $\alpha$  pada taraf 5% = 0,05 juga memperkuat bukti bahwa persentase derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tingginya derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin baik.

Keadaan tersebut sesuai dengan latar belakang penelitian dimana rasio PAD terhadap TPD yang tinggi menunjukkan kemandirian keuangan yang semakin meningkat yang diharapkan akan meningkatkan output perekonomian. Temuan empiris ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Aryanto (2011), yang menganalisis hubungan antara variabel keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data runtut waktu selama tiga tahun (2007-2009) di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi diperoleh hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah daerah atau sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci (2013) di enam kabupaten dan kota di Provinsi Banten, juga menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### b. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil regresi di atas, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis signifikansi statistik secara parsial. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka digunakan uji t.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$  kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_1 : \beta_1 \neq 0$  kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel kemandirian keuangan daerah (DDF) mempunyai tanda positif dan besarnya adalah 0,397469, nilai t hitung variabel DDF adalah 1.926624 dengan probabilitas 0,0622. Dengan menggunakan angka derajat keyakinan  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan nilai df (degree of freedom)  $(n-k) = (50-2) = 48$  maka diperoleh t tabel sebesar 1.658. Maka t hitung lebih besar dari t tabel yakni  $1,926624 > 1,658$  serta nilai signifikansinya  $0,0622 > 0,05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif

namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

#### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Besarnya nilai statistik koefisien determinasi yang telah ditetapkan ( $R^2$ ) yang diperoleh dari hasil regresi linear sederhana adalah sebesar 0,620928. Hal ini berarti bahwa 62,09 persen variasi yang terjadi pada variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2013 dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (DDF). Dengan demikian masih terdapat sisanya sebanyak 38,81 persen dijelaskan oleh kontribusi variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka ditemukan beberapa simpulan yang dapat dijabarkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

a. Tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota

Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama lima tahun masih berada dalam skala interval yang sangat rendah. Berada dalam skala interval 0,00-10,00%, yakni dengan rata-rata per kabupaten hanya sebesar 4,91%. Keadaan ini menjelaskan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerah masih sangat rendah. Kondisi ini disebabkan karena PAD kabupaten dan kota di Provinsi Jambi relatif kecil dibandingkan dengan total pengeluaran daerahnya masing-masing.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah kabupaten dan kota harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan serta kerja keras pemerintah daerah harus ada untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mampu mencari alternatif-alternatif baru yang memungkinkan untuk mengatasi pembiayaannya, sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat masih cukup tinggi disebabkan sumber-sumber keuangan potensial negara dimiliki oleh pemerintah pusat.

b. Pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Setelah dilakukan penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama periode penelitian mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Namun secara statistik, angka probabilitas sebesar 0.0622 (yang lebih besar dari  $\alpha=5\%$ , menunjukkan bahwa meskipun rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Keadaan tersebut terjadi karena tidak ada pengaruh secara langsung antara variabel kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan serta simpulan, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

- a. Perlunya dilakukan evaluasi kebijakan alokasi penggunaan dana perimbangan. Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak karena pajak daerah sebagai penerimaan yang paling dominan untuk penerimaan PAD. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian khususnya pada bidang jasa, hotel dan restaurant serta industri pengolahan dan juga pertanian karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai yang paling tinggi terhadap peningkatan PDRB di Provinsi Jambi.
- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat didukung dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah khususnya pada daerah memiliki rata-rata perubahan PDRB terbesar di Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Pengurangan ketergantungan dana perimbangan harus dilakukan dengan kebijakan yang tepat agar tidak mengganggu kinerja pemerintah dan ekonomi dalam jangka panjang serta penggunaannya sesuai dengan tujuan awal yaitu mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah dan bersifat sebagai pendukung untuk tujuan pembangunan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, R. 2011. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah Vol. II.
- Halim, A. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. dan Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 2*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rochjadi, A. 2006. *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*. Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Sukirno, S. 2012. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT. Raja Grafindo, Andi Offset, Jakarta.
- Sidik, M. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksana Desentralisasi Fiskal*. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah <http://www.depkeu.go.id> diakses tanggal 11 November 2014.
- Suci, C.S. 2013. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Banten*. Skripsi.